

Perancangan Tata Kelola TI Dengan Menggunakan Framework Cobit 5 (Studi Kasus: Pemerintah Kab. Jenepono)

Maskur^{a*}, Achmad Djunaedi^a, Dani Adhipta^a, Sumirah^b

^aJurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada
Jalan Grafika 2, Yogyakarta 55281, Indonesia

^bPengolah Data Elektronik, Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
Jl. Sukarno-Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat 83363, Indonesia

Abstrak

Teknologi Informasi (TI) memiliki peran penting mewujudkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju *Good Governance*. Untuk memastikan penggunaan TI tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan maka diperlukan tata kelola TI. Pemerintah Kabupaten Jenepono belum memiliki tata kelola dalam melakukan investasi TI. COBIT 5 dapat digunakan sebagai kerangka kerja dalam penyusunan tata kelola TI, karena COBIT 5 menyediakan panduan lengkap dan komprehensif yang dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan TI dan memberikan nilai melalui tata kelola dan manajemen yang efektif.

Keywords: Tata Kelola TI; COBIT 5; Pemkab Jenepono.

Received 10 August 2016; Accepted 11 August 2016

1. Pendahuluan

Teknologi Informasi (TI) pada awalnya hanya dimanfaatkan untuk menyelesaikan proses-proses manual yang terjadi pada suatu organisasi. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan TI, maka fungsi TI mengalami perubahan, tidak lagi hanya untuk mempermudah pada level operasional tetapi mulai digunakan sebagai suatu strategi dalam pengambilan keputusan oleh para pimpinan. Penerapan TI oleh sebuah organisasi akan memperoleh manfaat sehingga investasi TI dirasa perlu untuk meningkatkan kemampuan organisasi tersebut dalam berkompetisi dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat (Putra).

Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah membutuhkan pengelolaan yang profesional, sumber daya yang handal serta biaya yang cukup besar dengan resiko kegagalan yang tidak rendah, yaitu bila terjadi gangguan pada TI yang dimiliki. Meskipun demikian penerapan TI dapat digunakan secara maksimal, untuk itu dibutuhkan pemahaman yang tepat mengenai konsep dasar dari sistem yang berlaku, teknologi yang dimanfaatkan, aplikasi yang digunakan dan juga pengelolaan serta pengembangan sistem TI yang dilakukan

(Sugeng Winardi) atau diperlukan adanya panduan yang mengatur bagaimana pemanfaatan TI dalam organisasi [3]. Sehubungan dengan TI di lingkungan pemerintahan, dibutuhkan suatu tata kelola yang tepat dalam memaksimalkan pemanfaatannya. Peran tata kelola teknologi informasi untuk memastikan penerapan TI benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan resiko terkait dengannya dipandang sebagai solusi bagi permasalahan tersebut dan saat ini telah menjadi prioritas manajemen di banyak organisasi sebagai unsur penentu keberhasilan TI di dalam organisasi [4].

Pemerintah Kabupaten Jenepono semakin mendesak terkait dengan berbagai inisiatif penerapan TI yang dilakukan. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Jenepono belum memiliki dokumen tata kelola TI yang dapat dijadikan panduan atau pedoman dalam pengelolaan sumber daya dan resiko terkait dengan TI sehingga seringkali tujuan penerapan TI untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan didalam mewujudkan pelayanan yang efisien dan efektif tidak dapat tercapai. Adapun beberapa isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam upaya melakukan pembangunan di Kabupaten Jenepono saat ini adalah sebagai berikut [5]:

* Corresponding author.

E-mail: maskur.cio13@mail.ugm.ac.id; sumirah.sirahgata@gmail.com

- a) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- c) Peningkatan kualitas pelayanan publik
- d) Penciptaan iklim investasi yang kondusif
- e) Penguatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan pemerintah, masyarakat dan swasta
- f) Peningkatan sumber-sumber pendanaan, pengelolaan anggaran dan ketepatan alokasi investasi pembangunan.
- g) Strategi pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

2. Landasan Teori

2.1. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication Technologies*; ICT) adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi [6]. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.

2.2. Tata Kelola TI

2.2.1. Definisi

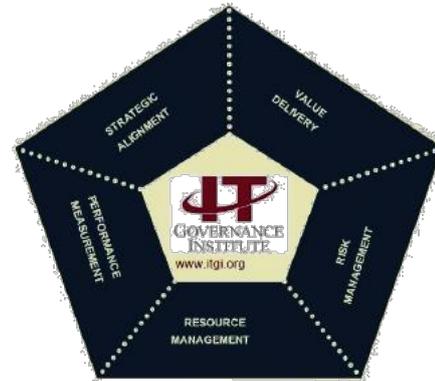
Menurut *IT Governance Institute* (ITGI) mendefinisikan tata kelola TI sebagai suatu bagian integral dari tata kelola perusahaan yang terdiri atas kepemimpinan, struktur dan proses organisasional yang memastikan bahwa TI organisasi berlanjut serta meningkatkan tujuan dan strategi organisasi [7]. Hal ini berarti lebih menitikberatkan bagaimana membantu mengatur dan mengarahkan perilaku penggunaan TI agar sesuai dengan perilaku yang diinginkan (perilaku yang sesuai dengan visi misi, nilai-nilai, strategi dan budaya organisasi) [8].

Sementara itu, Weil dan Ross (2004) mendefinisikan tata kelola TI sebagai spesifikasi hak keputusan dan kerangka akuntabilitas untuk mengarahkan perilaku yang diinginkan dalam penggunaan TI. Mereka juga menegaskan bahwa tata kelola TI tidak sekedar tentang pembuatan keputusan spesifik tetapi lebih pada penentuan siapa yang secara sistematis membuat dan berkontribusi pada keputusan tersebut [7].

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat dilihat bahwa penekanan tata kelola TI adalah untuk menciptakan TI dapat berjalan selaras dengan bisnis dari suatu perusahaan dan pihak manajemen memiliki peranan sangat penting dalam implementasi tata kelola TI.

2.2.2. Fokus area tata kelola TI

Menurut *IT Governance Institute* pada tata kelola teknologi informasi yang ditunjukkan pada gambar 1 terdapat lima area yang menjadi fokus utama yaitu keselarasan strategi (*Strategic Alignment*), penyampaian nilai (*Value Delivery*), manajemen resiko (*Risk Management*), manajemen sumber daya (*Resource Management*) dan pengukuran kinerja (*Performance Measurement*) [9].



Gambar.1 Tata kelola TI

- 1) Keselarasan Strategi (*Strategic Alignment*): “*IT alignment is a journey not a destination*” – menggambarkan bahwa keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam penerapan tata kelola TI bukan hanya keselarasan dan integrasi strategi TI dengan bisnis untuk masa sekarang dan masa yang akan datang saja yang menjadi pokok utama dalam *Strategic Alignment*, tetapi juga kemampuan untuk meningkatkan nilai bisnis yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.
- 2) Penciptaan Nilai (*Value Delivery*): Menurut ITGI (*IT Governance Institute*, 2006), layanan TI sendiri tidak akan mampu memberikan manfaat secara langsung terhadap bisnis. Manfaat tersebut hanya bisa dihasilkan bila TI diimplementasikan bersama-sama dengan peningkatan dalam bisnis, bisnis proses, kompetensi dan prinsip kerja tiap individu dalam perusahaan, serta perubahan-perubahan yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri.
- 3) Manajemen Sumber Daya (*Resource Management*): Pengelolaan sumber daya TI harus dilakukan secara tepat untuk kebutuhan bisnis. Sumber daya TI tersebut meliputi: perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur TI, peningkatan kualitas SDM dalam bidang TI dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan dalam bidang TI.
- 4) Manajemen Risiko (*Risk Management*): Manajemen risiko menitikberatkan pada hal-hal yang berkenaan dengan pengendalian internal dan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, *stakeholder*, dan *shareholder*. Segala kemungkinan risiko harus dapat

diidentifikasi sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi dampak dari terjadinya risiko tersebut.

- 5) Pengukuran Kinerja (*Performance Measurement*): Pengukuran kinerja akan menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan tata kelola TI. Hal ini dapat memberikan gambaran apakah hasil kinerja terhadap domain tata kelola TI sudah sesuai dengan tujuan masing-masing.

2. 2. 3. Tujuan penerapan tata kelola TI

Sedangkan tujuan dari diterapkannya tata kelola TI dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut [10]:

- 1) Tujuan jangka pendek, yaitu tata kelola TI digunakan untuk menekan biaya operasional TI dengan cara mengoptimalkan operasi-operasi yang ada di dalamnya melalui pengendalian pada setiap proses penggunaan sumber daya TI dan penanganan resiko yang terkait dengan penggunaan TI.
- 2) Tujuan jangka panjang, yaitu tata kelola TI membantu perusahaan untuk tetap fokus terhadap nilai strategis penerapan TI (*IT Strategic Value*) dan memastikan penerapan TI dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

2. 2. 4. Pemilihan framework tata kelola TI

Saat ini telah banyak dikembangkan *framework* tata kelola TI. Setiap *framework* memiliki fokus penekanan yang berbeda-beda dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beberapa *framework* tata kelola TI yang umum digunakan di dunia yakni sebagai berikut : COBIT, ITIL dan ISO/IEC 17799.

ITIL adalah seperangkat konsep dan praktik untuk mengelola layanan TI, pengembangan dan operasi TI. *Framework* ITIL memberi deskripsi rinci sejumlah praktek penting TI dan menyediakan daftar komprehensif tugas dan prosedur yang di dalamnya setiap organisasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sendiri. ITIL diterbitkan dalam suatu seri buku, masing-masing mencakup topik manajemen TI. Nama ITIL merupakan merk dagang terdaftar atas milik *United Kingdom's Office of Government Commerce* (OGC) [11][12].

ISO/IEC 17799 adalah kode praktis pengelolaan keamanan informasi yang dikembangkan oleh *The International Electrotechnical Commission* (IEC) yang bertanggungjawab terhadap standarisasi peralatan elektronik. ISO/IEC 17799 adalah panduan yang terdiri dari saran dan rekomendasi yang digunakan untuk memastikan keamanan informasi organisasi [11][13].

COBIT adalah seperangkat pedoman umum untuk manajemen TI yang dibuat oleh ISACA dan ITGI pada tahun 1996. COBIT menyediakan serangkaian langkah yang diterima secara umum, indikator proses dan praktik terbaik untuk membantu mereka (manajer, auditor dan pengguna TI) dalam memaksimalkan manfaat yang

diperoleh melalui penggunaan TI dan pengembangan tata kelola TI yang sesuai dan pengendalian dalam perusahaan [11][12]. Pada penelitian ini penulis menggunakan COBIT 5 sebagai *framework* dalam perancangan tata kelola TI karena peran dan tata kelola TI mencakup dua hal utama, yakni pengaturan (*govern*) dan pengelolaan (*manage*). Pengaturan mencakup hal-hal apa yang mendasari tata kelola tersebut yang ditentukan melalui pendefinisian strategi dan kontrol.

3. COBIT 5

COBIT merupakan standar tata kelola TI yang dikembangkan oleh *IT Governance Institute* (ITGI), yaitu sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model tata kelola TI yang berbasis Amerika Serikat. COBIT adalah kerangka kerja tata kelola TI (*IT Governance Framework*) dan kumpulan alat yang mendukung dan memungkinkan para manajer untuk menjembatani jarak (*gap*) yang ada antara kebutuhan yang dikendalikan (*control requirements*), masalah teknis (*technical issues*) dan resiko bisnis (*business risk*) [14][15]. Berbeda dengan standar-standar tata kelola TI lainnya, COBIT mempunyai cakupan yang lebih luas, komprehensif dan mendalam dalam melihat proses pengelolaan TI. Selain sebagai *framework* tata kelola TI, COBIT juga dapat digunakan sebagai *framework* untuk melakukan audit dan evaluasi TI

3. 1. Definisi

COBIT (*Control Objective for Information and related Technology*) merupakan sekumpulan dokumentasi dan panduan untuk mengimplementasikan *IT Governance*, kerangka kerja yang membantu auditor, manajemen, dan pengguna (*user*) untuk menjembatani pemisah (*gap*) antara risiko bisnis, kebutuhan kendali, dan permasalahan-permasalahan teknis. COBIT dikembangkan oleh *IT Governance Institute* (ITGI) yang merupakan bagian dari *Information Systems Audit and Control Association* (ISACA) [16].

COBIT mempermudah perkembangan peraturan yang jelas dan praktik baik (*good practice*) untuk mengendalikan TI dalam organisasi. COBIT menekankan keputusan terhadap peraturan, membantu organisasi untuk meningkatkan nilai yang ingin dicapai dengan penggunaan TI, memungkinkan untuk menyelaraskan dan menyederhanakan penerapan dari kerangka COBIT.

3. 2. Perbedaan COBIT 4.1 dengan COBIT 5

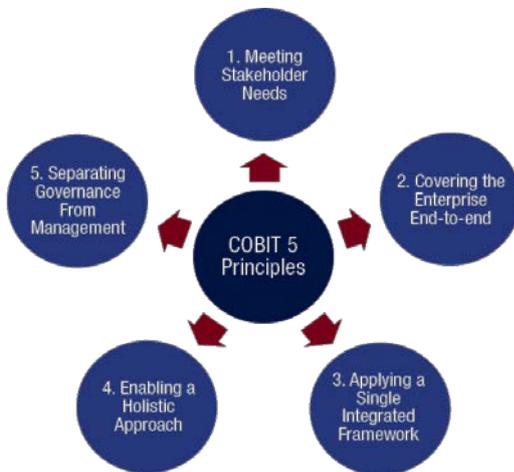
COBIT 4.1 dengan COBIT 5 mempunyai beberapa perbedaan, terutama dalam pembagian domain dan aktivitas proses kerjanya. Pada kerangka kerja COBIT 5, terdapat pemisahan yang tegas antara tata kelola dengan manajemen. Tata kelola pada sebagian besar perusahaan merupakan tanggung jawab dari dewan direksi yang dipimpin oleh pemilik, sedangkan manajemen merupakan tanggung jawab semua manajer eksekutif yang dipimpin

oleh direktur operasional dalam menjalankan operasional kerja [17]. Dengan adanya pemisahan ini di COBIT 5, maka akan memudahkan bagi institusi yang ingin secara jelas memisahkan antara tata kelola dengan proses operasional rutin.

COBIT juga mempertimbangkan beberapa standar dalam penyusunan pengendalian pada semua versi yang dirilis. Referensi standar yang digunakan dalam COBIT 5 lebih lengkap dibandingkan dengan COBIT 4.1. Perbedaan referensi standar yang digunakan dalam COBIT 4.1 dan COBIT 5 dimuat dalam Tabel berikut [18] [17].

3. 3. Prinsip-prinsip dalam COBIT 5

Kerangka kerja ini membahas bisnis maupun TI bidang fungsional disuatu perusahaan dan mempertimbangkan TI terkait kepentingan *stakeholder* internal & eksternal. COBIT 5 didasarkan pada lima prinsip kunci untuk tata kelola dan manajemen perusahaan TI seperti ditunjukkan pada gambar 2, yaitu [17]:



Gambar .2 Lima prinsip dalam COBIT 5

3. 4. Model Referensi Proses

Kerangka kerja COBIT memperhatikan tujuan dari organisasi dengan melaksanakan domain yang terdapat dalam kerangka tersebut melalui pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan penyampaian informasi yang tepat.

Dalam kerangka tersebut seluruh domain memiliki peran yang sama dalam pencapaian tujuan teknologi informasi. COBIT 5 mendefinisikan model referensi proses yang baru dengan tambahan domain *governance* dan beberapa proses baik yang sama sekali baru ataupun modifikasi proses lama serta mencakup aktivitas organisasi secara *end-to-end*. Selain mengkonsolidasikan COBIT 4.1, *Val IT* dan *Risk IT* dalam sebuah *framework*, COBIT 5 juga dimutakhirkan untuk menyelaraskan dengan *best practice* yang ada seperti ITILv3 dan TOGAF. COBIT 5 memisahkan dua dimensi yakni *governance* dan *management* [14][17]

Domain tata kelola memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dengan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan, kondisi dan pilihan *stakeholder*, menetapkan

arah (*direction*) melalui skala prioritas dan pengambilan keputusan dan pemantauan (*monitoring*) pada saat pelaksanaan, penyesuaian dan kemajuan terhadap arah serta tujuan yang telah disepakati.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari hasil diskusi, kuesioner dan wawancara berdasarkan proses dalam COBIT 5. ISACA memberikan prosedur untuk melakukan audit atau menilai adanya dokumen formalitas (adanya kontrak, SLA atau proses dokumentasi prosedur) menggunakan pilihan jawaban “ya” atau “tidak” [19], karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang tegas terhadap proses pengelolaan tata kelola TI dari aparat yang membidangi TI. Lokasi penelitian dilakukan dengan studi kasus tata kelola TI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

4. 1. Alat dan Bahan Penelitian

a. Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat komputer, kuesioner dan responden penelitian.

- 1) Perangkat komputer.
- 2) Kuesioner
- 3) Reponden.

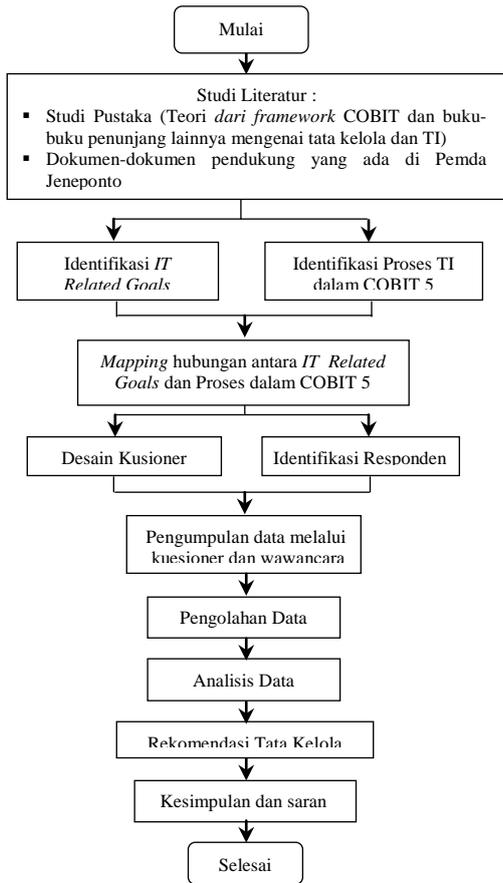
b. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Literatur tata kelola TI, literatur COBIT 5, Panduan Tata Kelola TIK Nasional dan penelitian terdahulu yang terkait.
- 2) Dokumen RPJMD, Rencana Strategis TI, Peraturan Daerah, dokumen Statistik tahun 2013.

4. 2. Jalannya Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan tahapan-tahapan seperti yang ditunjukkan pada gambar 3 berikut.

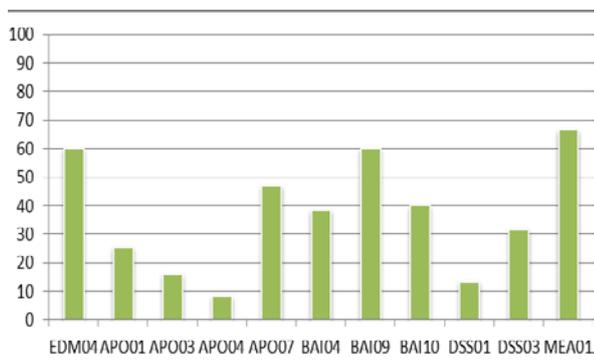


Gambar. 3 Bagan tahapan penelitian.

5. Hasil dan Pembahasan

5. 1. Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas

Penilaian akan tingkat kapabilitas COBIT mengacu pada standar *Process Assessment Model (PAM)* dari ISACA. Penilaian dilakukan pada 11 proses COBIT yang dipilih sesuai dengan hasil *mapping IT-Related Goals* yakni optimalisasi aset TI, sumber daya dan kapabilitas terhadap proses TI yang ada di Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Pada gambar 4 berikut menunjukkan pencapaian tingkat kapabilitas atas proses yang telah diukur.



Gambar 4. Presentase pencapaian proses pengendalian

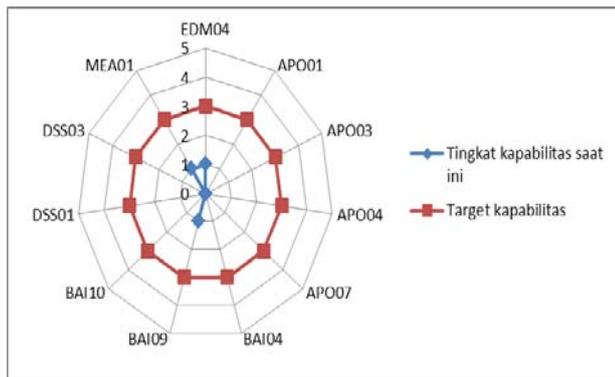
Pada gambar 4 diatas diketahui proses pengendalian TI di Pemerintah Kabupaten Jeneponto berada pada tingkat kapabilitas 0 sampai dengan 1. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. APO01 (mengatur *framework* manajemen TI), APO03 (manajemen rencana strategis TI), APO04 (manajemen inovasi), APO07 (manajemen sumber daya manusia), BAI04 (manajemen ketersediaan dan kapasitas), BAI10 (manajemen konfigurasi), DSS01 (manajemen operasional) dan DSS03 (manajemen permasalahan TI) berada pada tingkat 0. Tingkatan kapabilitas tersebut menggambarkan tidak ada upaya dari pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan TI (*IT Related Goals*).
- b. EDM04 (memastikan optimalisasi sumber daya), BAI09 (manajemen aset) dan MEA01 (memantau, mengevaluasi, menilai kinerja dan kesesuaian) berada pada tingkat 1. Pada tingkatan tersebut sudah terdapat implementasi proses untuk mencapai tujuan TI (*IT Related Goals*).

Sesuai dengan hasil wawancara kepada beberapa pejabat yang menangani TI di Pemerintah Kabupaten Jeneponto, maka dapat ditentukan target tingkat kapabilitas untuk seluruh proses yang dievaluasi adalah 3.00. Untuk mengetahui seberapa besar *gap* (kesenjangan), maka TABEL I dan Gambar 5 berikut ini menunjukkan kesenjangan yang terjadi antara target tingkat kapabilitas proses yang diharapkan dengan tingkat kapabilitas proses saat ini.

Tabel I. Daftar Capaian Proses Cobit 5

No	Proses	Target	Kondisi saat ini	Gap
1	EDM04- Memastikan optimalisasi sumber daya	3	1	2
2	APO01- Mengatur <i>framework</i> manajemen TI	3	0	3
3	APO03- Mengatur rencana strategis TI	3	0	3
4	APO04- Manajemen inovasi	3	0	3
5	APO07- Mengelola SDM	3	0	3
6	BAI04- Mengelola ketersediaan dan kapasitas	3	0	3
7	BAI09- Manajemen aset	3	1	2
8	BAI10- Manajemen konfigurasi	3	0	3
9	DSS01- Manajemen operasional	3	0	3
10	DSS03- Manajemen masalah TI	3	0	3
11	MEA01- Memantau, mengevaluasi, menilai kinerja dan kesesuaian	3	1	2



Gambar 5. Gap tingkat kapabilitas proses saat ini dan target proses.

6. Penutup

6.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan berikut ini bahwa hasil pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI terdapat delapan proses COBIT yang belum sepenuhnya dilaksanakan atau diterapkan sehingga belum mencapai tujuan dari proses tersebut (tingkat kapabilitas 0 – *Incomplete Process*), yakni:

- Domain Align, Plan and Organise (APO)*
APO01- Mengatur *framework* manajemen TI
APO03- Mengatur rencana strategis TI
APO04- Manajemen Inovasi
APO07- Mengelola SDM
- Domain Build, Acquire and Implement (BAI)*
BAI04- Mengelola ketersediaan dan kapasitas
BAI10- Manajemen konfigurasi
- Domain Deliver, Service and Support (DSS)*
DSS01- Manajemen operasional
DSS03- Manajemen masalah TI

Terdapat tiga proses COBIT yang telah diterapkan atau dilaksanakan dan telah mencapai tujuan dari proses tersebut (tingkat kapabilitas 1 – *Performed process*), yakni:

- EDM04- Memastikan Optimalisasi Sumber Daya
- BAI09- Manajemen Aset
- MEA01- Memantau, mengevaluasi, menilai kinerja dan kesesuaian

Hasil penilaian dari tingkat kapabilitas tata kelola TI pada aspek optimalisasi aset TI, sumber daya dan kapabilitas di Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto belum mencapai target yang diinginkan. masih terdapat kesenjangan antara keadaan saat ini dengan target yang ditetapkan pada setiap proses.

6.2. Saran

Adapun saran yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan proses tata kelola TI di Pemerintah Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut; dibutuhkan *political will* untuk mendukung penerapan TI dalam mewujudkan *good governance*., dan disarankan untuk

melakukan perbaikan terhadap kepemimpinan dan struktur organisasi sebagai berikut:

- Dalam hal kepemimpinan dan struktur organisasi bidang teknologi informasi di Kabupaten Jeneponto, perlu ditetapkan seorang *Chief Information Officer (CIO)*.
- Perlu dibentuk Komite Strategi TI untuk memastikan tercapainya keselarasan antara tujuan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan setiap inisiatif TI yang berjalan.
- Untuk menjalankan peran tata kelola TI dengan baik ditingkat eksekutif maka perlu dibentuk komite pengarah TI yang bertanggungjawab melakukan pemantauan terhadap investasi TI.
- Struktur satuan kerja pengelola TI Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Untuk meningkatkan kapabilitas tata kelola TI dan dapat mencapai target yang diinginkan, maka dapat dilakukan perbaikan yang dimulai dari merencanakan dan melaksanakan audit infrastruktur TI secara rutin yang dilakukan oleh auditor independen.

Untuk meningkatkan tingkat kapabilitas tata kelola, SKPD pengelola TI harus melakukan serangkaian praktik dasar perbaikan proses dan menghasilkan serangkaian produk kerja pada level 0 lalu dilanjutkan melakukan serangkaian praktik dasar perbaikan proses pada level 1.

Pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk seluruh proses yang dijalankan sesuai dengan ketentuan COBIT 5.

References

- Putra, "Rancangan Tata Kelola TI untuk Institusi Pemerintah Studi Kasus BAPPENAS," *Sist. Inf. MTI-UI*, vol. 1, pp. 7–25.
- Sugeng Winardi, "Penggunaan Kerangka Kerja COBIT untuk Menilai Pengelolaan TI dan Tingkat Pelayanan," *Teknol. Inf.*, vol. VII.
- A. A. Suryani, "Pengembangan Model IT Governance pada Organisasi Perguruan Tinggi dengan Menggunakan COBIT 4.1 Domain PO dan AI," 2009.
- F. J. Purnama and Priguna Kurniadi, "Penyusunan Tata Kelola TI untuk Kabupaten Bengkalis," 2009.
- Iksan Iskandar, *Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto*. 2013.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, "Teknologi Informasi Komunikasi."
- Jogiyanto dan Willy Abdillah, *Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Yohana Dewi Lulu w, "Analisa Teori IT Governance menggunakan COBIT 5," vol. I, no. I, pp. 99–106, 2013.
- "www.itgi.org."
- Fitroh, "Memahami Tata Kelola TI COBIT Versi 4.0," pp. 1–145.
- Rahmi Novita, "Penilaian Tingkat Kapabilitas Tata Kelola TI pada Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia," 2014.
- Jogiyanto, *Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta: McLeod, R, Jr. & Schell, G, P., 2011.
- R. Sarno, "Audit Sistem dan Teknologi Informasi," 2009.
- Nur Sigit Sulisty Hadi, "Pengukuran Tingkat Kapabilitas Tata Kelola Infrastruktur Jaringan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo," UGM Yogyakarta, 2013.
- ITGI, *Board Briefing on IT Governance 2nd Edition*. 2013.
- ISACA, "www.isaca.org/cobit."
- ISACA, *A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. USA: ISACA*. 2012.
- Rendra Papang Eko Noor Sancoyo, "Penyusunan Tata Kelola Audit E-Procurement Instansi Pemerintah," UGM, 2013.
- ISACA, *Implementation. USA: ISACA*. 2012.